

# PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)

## THE EFFECTS OF LOCAL TAX AND LOCAL RETRIBUTION ON LOCAL REVENUE

(Case Study in Local Government of the Cirebon District for Year 2010-2014)

Meilda Ellysa Putri<sup>1</sup>, Sri Rahayu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom  
[meildaellysa@gmail.com](mailto:meildaellysa@gmail.com)<sup>1</sup>, [srirahayu@telkomuniversity.ac.id](mailto:srirahayu@telkomuniversity.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Abstrak

Kontribusi Dana Perimbangan pada Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2014 mempunyai rata-rata sebesar 64,4% sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 12%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Kata Kunci** : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

---

### Abstract

*The contribution of central government transfer in local government of the Cirebon District for year 2010-2014 has an average of 64,4%. While local revenue contributes 12% only. This indicates that local government still relies on central government. Local government needs to optimize its local revenue. This research aims to identify and analyze the effects of local tax and local retribution towards local revenue in the local government of Cirebon District for 2010-2014 fiscal year. The research methodology used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the analysis, it can be concluded that local tax and local retribution simultaneously have significant effects on local revenue with the percentage of 80,3%. Partially both local tax and local retribution have significant effect on local revenue.*

**Keyword** : Local Tax, Local Retribution, Local Revenue

---

### 1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Cirebon merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Otonomi daerah yang berlandaskan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD.

**Tabel 1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2014**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	%	Dana Perimbangan	%	Lain-lain Pendapatan	%
2010	139.100.095.150	9	1.045.997.902.137	71	297.950.828.932	20
2011	193.843.221.050	11	1.099.402.437.492	62	487.997.430.170	27
2012	229.992.688.130	12	1.327.558.618.721	67	436.714.005.857	22
2013	250.848.893.157	11	1.488.073.473.884	64	577.089.298.064	25
2014	452.788.598.479	17	1.585.728.329.531	58	694.981.158.664	25

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, tidak hanya untuk tahun 2010 saja yang didominasi oleh Dana Perimbangan. Namun, dari setiap tahun kontribusi yang mendominasi sumber penerimaan daerah adalah Dana Perimbangan. Hal ini menandakan kontribusi PAD masih belum optimal dalam pengelolaannya dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Cirebon ini masih bergantung oleh Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kurang optimalnya PAD dalam kontribusi pada sumber pendapatan daerah, menandakan kurangnya juga dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pengoptimalan PAD dilakukan dengan cara lebih ditekankan lagi dalam penggalan potensi-potensi sumber daya lokal daerah Kabupaten Cirebon.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah merupakan sumber PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Namun, sumber pendapatan yang paling potensial adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, dimana penerimaan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Budi Waluyo (2012) pada dasarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu Daerah yang dibayar oleh masyarakat yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Sedangkan untuk Retribusi Daerah yaitu bisa dipungut berkali-kali sepanjang masyarakat tersebut memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan keperluan daerahnya.

Berdasarkan media *online* radarcirebon.com pada tanggal 29 Juni 2012 menyatakan bahwa Dewan mempertanyakan pertanggungjawaban bupati tentang pelaksanaan APBD 2011. Dimana disebutkan keseluruhan penerimaan pajak karena melebihi target, kecuali jenis pajak penerangan jalan yang realisasinya hanya mencapai 97,86 persen. Namun, menurut Junaedi, pemasukan dari Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai 100 persen diperoleh dari data yang ada pada pembayaran PBB. Sedangkan untuk Retribusi daerah juga disebutkan target retribusi dari berbagai jenis tersebut hanya mencapai sekitar 71 persen dari target Rp 49 Milyar lebih. Alasannya ada beberapa jenis retribusi yang diperoleh masih berada dibawah 100 persen. Berdasarkan hal tersebut, pemaparan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang sebenarnya masih belum memenuhi target. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari berbagai jenis, ada beberapa yang masih belum optimal. Guna meningkatkan tingkat kemandirian suatu daerah maka perlu meningkatkan potensi-potensi sumber daya yang berasal dari daerahnya agar meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Krisna dan Ni Gusti Putu (2013) menyebutkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, Pajak Daerah yang dominan dalam peningkatan PAD. Dini Anggraeni (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa persentase kontribusi pajak di daerah Sleman cukup signifikan terhadap PAD, hal ini membuktikan peranan pajak di Sleman cukup besar. Sedangkan hasil penelitian Yeni Priatnasari (2012) menyatakan bahwa diperoleh adanya hubungan positif tetapi tidak signifikan antara Retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Retribusi Daerah akan diikuti oleh peningkatan PAD. Berdasarkan Helvianti (2009) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Rokan Hilir. Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan merupakan bagian dari Pajak Daerah sehingga kedua jenis pajak tersebut mempengaruhi peningkatan PAD. Sedangkan, di daerah Kabupaten Bantul Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isti dan Dewi (2014). Namun pada penelitian tersebut yang berpengaruh signifikan terhadap PAD adalah Retribusi Parkir. Mohammad Riduansyah (2003) menjelaskan dalam penelitiannya yaitu kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap total perolehan penerimaan tercermin pada APBD-nya dikaitkan dengan kemampuan dengan kemampuan dalam melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Pada penelitian Dian Mayasari (2006)

bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten dan kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan masih banyak potensi pajak yang tidak tergalai. Budi Waluyo (2012) atas penelitiannya menjelaskan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Depok, hal ini disebabkan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Selain dalam Pajak Daerah berjenis Reklame, Budi Waluyo (2012) juga menyampaikan Retribusi Daerah berjenis Jasa Umum juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010-2014 pada Kabupaten Cirebon, dan bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan parsial. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan parsial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, teknik analisis regresi berganda, uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parsial.

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### 2.1 Dasar Teori

#### 2.1.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah (Darwin, 2010:68) yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian Dini Anggraeni (2012) dan Angger Wahyudian (2013) menjelaskan bahwa kontribusi Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 2.1.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah sebagaimana halnya dengan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Retribusi Daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian Yeni (2012) menjelaskan bahwa adanya pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan dalam penelitian Isti dan Dewi (2014) Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 2.2 Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014. Teknik sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:85). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk tahun anggaran 2010-2014 yang berjumlah 60 sampel. Terdiri dari bulan Januari hingga Desember pada tahun 2010-2014. Dalam melakukan pengolahan data, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana

Y = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub> = Pajak Daerah

X<sub>2</sub> = Retribusi Daerah

- a = konstanta  
 $b_1, b_2$  = koefisien regresi  
 e = variabel pengganggu

### 3. Pembahasan

Statistik deskriptif ditujukan untuk mengetahui berapa jumlah tertinggi, terendah dan rata-rata dari masing-masing variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 2 Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PajakDaerah	60	1,012,121,032	19,682,798,232	5,895,152,617.83	3,198,438,141.234
RetribusiDaerah	60	1,447,309,019	21,279,814,950	4,435,031,532.88	3,431,749,795.033
PendapatanAsliDaerah	60	8,158,964,370	83,905,795,376	21,180,008,132.30	12,064,575,588.175
Valid N (listwise)	60				

Sumber: *Output SPSS 20 (2015)*

Penjelasan masing-masing variabel berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif tersaji dalam penjelasan berikut:

a. Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2014

Berdasarkan uji statistik deskriptif diperoleh informasi bahwa jumlah Pajak Daerah terendah sebesar Rp 1.012.121.032. Sedangkan Pajak Daerah tertinggi sebesar Rp 19.682.798.232. Rata-rata penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu sebesar Rp 5.895.152.617,83. Standar Deviasi yang diperoleh sebesar Rp 3.198.438.141.234 yang menandakan bahwa data Pajak Daerah mengelompok atau tidak bervariasi. Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada Tabel 3 yang menyajikan informasi jumlah dan persentase perubahan Pajak Daerah pada Kabupaten Cirebon. Persentase perubahan dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya.

**Tabel 3 Pajak Daerah Kabupaten Cirebon**

Tahun	Jumlah	Persentase Perubahan
2009	29,017,998,930	-
2010	29.986.986.625	3,3 %
2011	50.361.167.621	67,9 %
2012	71.338.103.707	41,7 %
2013	81.617.720.438	14,4 %
2014	120.405.178.679	47,5 %

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon (2015)

b. Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2014

Berdasarkan uji statistik deskriptif diperoleh informasi bahwa jumlah Retribusi Daerah terendah sebesar Rp 1.447.309.019. Sedangkan Retribusi Daerah tertinggi sebesar Rp 21.279.814.950. Rata-rata penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu sebesar Rp 4.435.031.532,88. Standar Deviasi yang diperoleh sebesar Rp 3,431,749,795.033 yang menandakan bahwa data Retribusi Daerah mengelompok atau tidak bervariasi. Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4. Jumlah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2009 ke tahun 2010, terjadi perubahan penurunan yang sangat signifikan sebesar 69,4%. Namun, setelah tahun 2010 terjadi perubahan peningkatan dari tahun ke tahunnya.

**Tabel 4 Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon**

Tahun	Jumlah	Persentase Perubahan
2009	76,757,663,361	-
2010	23.514.242.756	(69.4) %
2011	35.331.921.898	50.3 %
2012	50.217.553.424	42.1 %
2013	53.648.557.597	6.8 %
2014	103.389.868.068	92.7 %

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon (2015)

c. Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2014

Berdasarkan uji statistik deskriptif diperoleh informasi bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah terendah sebesar Rp 8,158,964,370. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi sebesar Rp 83,905,795,376. Rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu sebesar Rp 21,180,008,132.30. Standar Deviasi yang diperoleh sebesar Rp 12,064,575,588.175 yang menandakan bahwa data Pendapatan Asli Daerah mengelompok atau tidak bervariasi. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada Tabel 5 yang menyajikan informasi jumlah dan persentase perubahan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Cirebon.

**Tabel 5 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon**

Tahun	Jumlah	Persentase Perubahan
2009	121,073,623,821	-
2010	139,100,095,150	14.9 %
2011	193.843.221.050	39.4 %
2012	229.992.688.130	18.6 %
2013	250.848.893.157	9.1 %
2014	452.788.598.479	80.5 %

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon (2015)

Menurut Sanusi (2011:135) regresi linier berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang ditetapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias. Berikut hasil uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Berdasarkan uji yang dilakukan dengan Kolmogrov Smirnov, besarnya nilai Smirnov sebesar 1,064 dengan tingkat signifikansi 0,207. Tingkat signifikansi yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Sehingga  $0,207 > 0,05$ , artinya data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji yang dilakukan dengan menggunakan grafik Scatter plot, dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

c. Uji autokorelasi

Berdasarkan uji yang dilakukan dengan menggunakan *Durbin-Watson (d)*, angka Durbin-Watson sebesar 1,984 sehingga tidak terjadi autokorelasi karena angka Durbin Watson berada diantara -2 sampai +2. Model regresi yang baik adalah jika bebas dari autokorelasi.

d. Uji multikolinieritas

Berdasarkan uji yang dilakukan dengan melihat nilai VIF dari hasil analisis regresi, nilai *Variance Inflating Factor (VIF)* pada variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 1,528 dimana angka yang diperoleh kurang dari 10. Maka dalam pengujian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sehingga tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

**Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error						
(Constant)	3677536473.021	1471345768.368		2.499	.015			
1 PajakDaerah	1.161	.270	.308	4.306	.000	.654	1.528	
RetribusiDaerah	2.403	.251	.684	9.562	.000	.654	1.528	

a. Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 3.677.536.473,021 + 1,161X_1 + 2,403X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Asli Daerah  
 $X_1$  = Pajak Daerah  
 $X_2$  = Retribusi Daerah  
 $\varepsilon$  = Error

Dari model regresi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta yang diperoleh adalah 3.677.536.473,021 menyatakan bahwa apabila variabel independen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bernilai nol, diasumsikan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh sebesar 3.677.536.473,021.
2. Koefisien regresi Pajak Daerah bernilai positif 1,161 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pajak Daerah maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1,161 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi Retribusi Daerah bernilai positif 2,403 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Retribusi Daerah maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 2,403 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap.

Uji hipotesis terdiri dari Koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Berikut hasil pengujian hipotesis:

- a. Koefisien determinasi  
 Berdasarkan uji yang dilakukan dengan melihat nilai  $R^2$ , nilai  $R^2$  yang diperoleh sebesar 0,803. Nilai ini menyatakan bahwa sebesar 80,3% perubahan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh, sedangkan sisanya sebesar 19,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.
- b. Uji signifikansi simultan (uji statistik F)  
 Berdasarkan uji yang dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, nilai F hitung sebesar 121,001 dengan tingkat signifikansi 0,000. Adapun nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas pembilang (df1) sebesar k = 2 dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar 57 adalah sebesar 3,16. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari F tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)  
 Berdasarkan uji yang dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. didapat dua kesimpulan diantaranya:
  - nilai t hitung untuk variabel Pajak Daerah sebesar 4,306. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang hanya sebesar 2,00247. Maka t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
  - nilai t hitung untuk variabel Retribusi Daerah sebesar 9,562. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang hanya sebesar 2,00247. Maka t hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t tabel sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 3.1 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh angka F hitung > F tabel yaitu 121,001 > 3,16. Dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Dapat diartikan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Peningkatan atau penurunan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis yang pertama yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2010-2014. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Md. Krisna dan Ni Gst. Putu (2013), Diana Sari dan Destria (2013) menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### 3.2 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu 4,306 > 2,00247. Dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 1,161 seperti yang tersaji dalam Tabel 6. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika Pajak Daerah meningkat sebesar satu satuan, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah akan ikut meningkat sebesar 1,161 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil pengujian ini mendukung

hipotesis yang kedua yaitu Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2010-2014. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Dini Anggraeni (2012) dan Angger Wahyudian (2013) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 3.3 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, diperoleh nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $9,562 > 2,00247$ . Dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 2,403 seperti yang tersaji dalam Tabel 8 hasil uji  $t$ . Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika Retribusi Daerah meningkat sebesar satu satuan, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah akan ikut meningkat sebesar 2,403 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis yang ketiga yaitu Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2010-2014. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Isti dan Dewi (2014) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 4. Kesimpulan dan Saran

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari setiap tahunnya untuk tahun anggaran 2010-2014.
2. Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. a. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
b. Secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran-saran berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya dalam Pendapatan Asli Daerah harus dilaksanakan secara terus-menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar Pendapatan Asli Daerah tersebut terus meningkat melalui penggalian potensi daerah dengan menambah dan mengembangkan jenis-jenis Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang sesuai dengan kepentingan daerah tersebut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon diharapkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, khususnya untuk penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sangat potensial dalam suatu daerah karena mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

- [1] Anggraeni, Dini. (2012). *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- [2] Darwin. (2010). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [3] Dwi, Isti dan Dewi Kusuma. (2014). *Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul*. Seminar Nasional Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- [4] Helvianti. (2009). *Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Riau*. Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatra Utara.
- [5] Krisna, Made dan Ni Gst. Putu. (2013). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali.
- [6] Mayasari, Dian. (2006). *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Skripsi. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, UMM, Malang.
- [7] Priatnasari, Yeni. (2012). *Pengaruh Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi*

- dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal.* Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Politeknik Tegal. Tegal.
- [8] Republik Indonesia. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- [9] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Jakarta.
- [10] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [11] Riduansyah, Mohammad. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7 No 2. Universitas Indonesia. Jakarta.
- [12] ]Sari, Diana dan Destria. (2013). *Influence of Local Tax and Local Retribution Toward the Local Financial Independence. International Conference On Business and Economic Research (4<sup>th</sup> ICBER 2013) Proceeding*. Universitas Widyatama, Bandung.
- [13] Wahyudian, Angger. (2013). *The Effect og Local Tax Towards Local Revenue in Malang District*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Volume 1 Nomor 2, Universitas Brawijaya. Surabaya.
- [14] Waluyo, Budi. (2012). *Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat*. Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Jakarta.

